



# Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah LPPD 2019

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

## **URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

### **1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### **2. Program dan Kegiatan**

#### **a. Program Kebinamargaan**

- Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

#### **b. Program Kebinamargaan**

- Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan
- Kegiatan Pembangunan Jalan
- Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan
- Kegiatan Pembangunan Jembatan
- Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat
- Kegiatan Inspeksi Kondisi jalan
- Kegiatan Inspeksi Kondisi jembatan
- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II
- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
- Kegiatan Pembangunan Jalan (DAK)
- Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan
- Kegiatan Pengadaan Alat-alat Laboratorium
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan
- Kegiatan Pembangunan Jalan (DAK Reguler)

c. Program Pengembangan Sumber Daya Air

- Kegiatan Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali banjir
- Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
- Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air
- Kegiatan Perencanaan Turap/talud/bonjong
- Kegiatan Konservasi Sumber Air
- Kegiatan Pembersihan/rehabilitasi/Normalisasi/Sungai/kali
- Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa
- Kegiatan Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air
- Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)

d. Program Penataan Ruang dan Pertanahan

- Kegiatan Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Kegiatan Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung
- Kegiatan Survey Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung
- Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang

e. Program Pembinaan Jasa Konstruksi

- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Provinsi
- Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

f. Program Pengawasan dan Peralatan PUPR

- Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Pengawasan dan Peralatan
- Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peralatan Workshop

3. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Tingkat pencapaian urusan wajib Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

- a. Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 92,23%
- b. Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi 24,92%

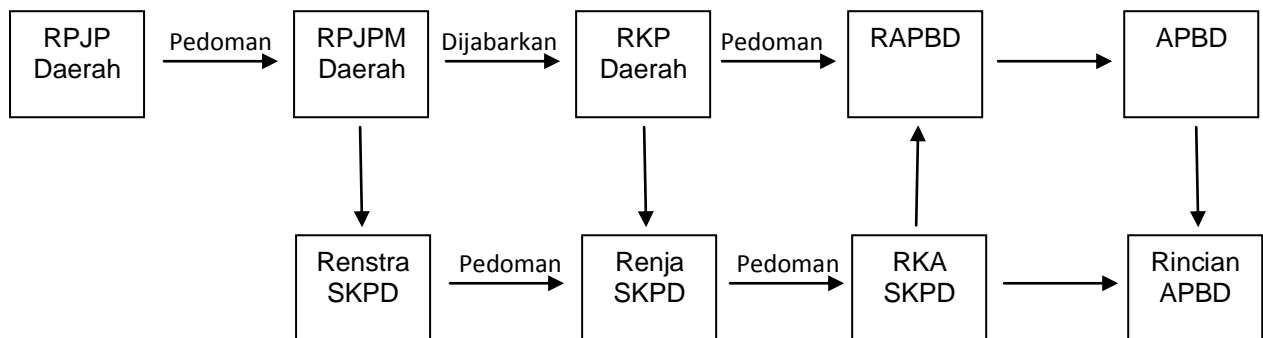
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Kriteria	Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Total
I.	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	7	-	7
		Gol. III	101	13	114
		Gol.II	37	4	41
		Gol. I	1	-	1
II.	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	
		S2	22	-	22
		S1	68	13	81
		D. IV	-	-	
		D. III	23	4	27
		D.I	-	-	
		SMA/ sederajat	36	-	36
		SMP/ sederajat	1	-	1
	SD/ sederajat	-	-		
III.	Berdasarkan Jabatan	Struktural:			
		Eselon II	1		1
		Eselon III	6		6
		Eselon IV	16		16
		Fungsional:			
		Tertentu	8	6	14
		Umum	115	11	126
JUMLAH TOTAL					163

## 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG ((Rp)			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	%	PD PENANGGUNG JAWAB
	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20.618.840.703	1.887.500.000	57.550.857.000	253.148.756.000	333.205.953.703	317.606.301.428,26	95,32	Dinas PUPR

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah



## 7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, cukup atau Kurang)

Kondisi Sarana dan Prasarana			Keterangan
Lengkap	Kurang	Mencukupi	
-	-	√	-

## **BAB V**

### **TUGAS PEMBANTUAN**

#### **1. Tugas Pembantuan**

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

##### **1.1. Tugas Pembantuan Bina Marga**

###### **a. Dasar Hukum**

DIPA Nomor : DIPA – 033.04.4.309036/2019

###### **b. Instansi Pemberi TP**

Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

###### **c. Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi**

<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	8.612.928.000,-	8.611.543.000,-

###### **d. OPD yang melaksanakan TP**

OPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan (TP) dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**e. Pegawai**

**TP Bina Marga**

NO	KRITERIA	RINCIAN	JML PNS	JML CPNS	TOTAL
I	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV Gol. III Gol.II Gol. I	- 9 4 -	- - - -	- 9 4 -
II	Berdasarkan Pendidikan	S3 S2 S1 D. IV D. III D. II D.I SMA / sederajat SMP / sederajat SD / sederajat	- 2 7 - - - - 3 - -	- - - - - - - - - -	- 2 7 - - - - 3 - -
III	Berdasarkan Jabatan	Struktural - eselon II - eselon III - eselon IV Fungsional	- - 1 1 -	- - - - -	- - 1 1 -

**f. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Kondisi sarana dan prasarana mencukupi.

**g. Permasalahan dan Solusi**

Tidak ada permasalahan dalam hal pelaksanaan dan realisasi anggaran Tugas Pembantuan mencapai 99,98% dan fisiknya 100%.

**1.2. Tugas Pembantuan Sumber Daya Air**

**a. Dasar Hukum**

DIPA Nomor : DIPA – 033.06.4.309214/2019

**b. Instansi Pemberi TP**

Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

**c. Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi**

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Pengelolaan Sumber Daya Air	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air	2.131.786.000,-	2.044.605.000,-

**d. SKPD yang melaksanakan TP**

SKPD yang melaksanakan Tugas Pembantuan (TP) dari Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum RI ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**e. Pegawai**

NO	KRITERIA	RINCIAN	JML PNS	JML CPNS	TOTAL
I	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I	1 4 4 -	- - - -	1 4 4 -
II	Berdasarkan Pendidikan	S3 S2 S1 D. IV D. III D. II D. I SMA / sederajat SMP / sederajat SD / sederajat	- 2 3 - - - - 4 - -	- - - - - - - - - -	- 2 3 - - - - 4 - -
III	Berdasarkan Jabatan	Struktural - eselon II - eselon III - eselon IV Fungsional	- 1 2 -	- - - -	- 1 2 -1

**f. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Kondisi sarana dan prasarana mencukupi.



**g. Permasalahan dan Solusi**

Tidak ada permasalahan dalam hal pelaksanaan dan realisasi anggaran Tugas Pembantuan mencapai 95,91% dan fisiknya 100%.

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

PROVINSI : PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	<b>KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	Program yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran Serta Realisasinya	4 Program	Lihat di APBD Lampiran 1.3 (Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP ada 2	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Penggunaan dan Pemakaian Peralatan kendaraan dan Alat-alat berat 2. SOP ttg pengumpulan data Kinerja	Ada, 2	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh menteri pembina teknis.
2	<b>KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN</b>	Peraturan Yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan ( PERDA/PERKADA Yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau Tidak Ada	Apabila ada sebutkan 1. Perda RTRW Prov. Kep. Babel 2. SK Gubernur Status Jalan Provinsi	Ada	Sumber data di Biro Hukum
3	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH</b>	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 23 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 23	100%	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 1. Pranata Komputer 2. Teknik Jalan dan Jembatan	Ada	Sumber data BKD/perangkat daerah terakhir/update tahun 2019
4	<b>PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Provinsi	- PNS sebanyak 163 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.469 personil	2,98%	
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan , sebanyak 18 org. - Pejabat, yang ada sebanyak 23 org.	78,26%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 23 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 23 jbt.	100%	
5	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA-Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah , sebanyak 6 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 Program	100%	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.</li> <li>- Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.</li> </ul>	100%	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.</li> <li>- Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 6 program.</li> </ul>	100%	
		Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi Anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Total Anggaran Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp 333.205.953.703</li> <li>- Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp 3.064.703.819.549</li> </ul>	10,87 %	
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 317.606.301.428,26</li> <li>- Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp 2.785.051.756.383,58</li> </ul>	11,40 %	
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp 298.911.599.139,26</li> <li>- Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp 317.606.301.428,26</li> </ul>	94,11 %	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2019)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp 18.694.702.289 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp 317.606.301.428,26	5,89 %	
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (LRA, Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. CALK 4. LO 5. LPE	Ada sebanyak 5 jenis	
7	<b>PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya Inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.Buku induk inventaris	Ada	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp 2.032.128.628.109,98	0 %	
8	<b>PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT</b>	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan pengumuman 2. Pengumuman melalui web site 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah sebanyak-5 jenis.	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ----	tidak ada	

## TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN

**ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN  
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

## PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35	Jalan provinsi dalam kondisi baik	$\frac{784,86 \text{ km}}{850,99 \text{ km}} \times 100\%$	92,23%	Sumber data dari Dinas PU & Penataan Ruang
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36	Presentase Panjang Jalan Provinsi yang di rehabilitasi/direkonstruksi	$\frac{8,62 \text{ km}}{44,82 \text{ km}} \times 100\%$	19,23%	Sumber data dari Dinas PU & Penataan Ruang
		37	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	$\frac{108,56 \text{ ha}}{48.310,16 \text{ ha}} \times 100\%$	0,22%	Sumber data dari Dinas PU & Penataan Ruang
		38	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Provinsi	$\frac{3,855 \text{ ha}}{324,105 \text{ ha}} \times 100\%$	1,2.%	Sumber data dari Dinas PU & Penataan Ruang
		39	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{200 \text{ ha}}{2849 \text{ ha}} \times 100\%$	7,02%	Sumber data dari Dinas PU & Penataan Ruang

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		43	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan Ahli	$\frac{149 \text{ orang}}{150 \text{ orang}} \times 100\%$	99,33%	Sumber data dari Dinas PU & Penataan Ruang
10	Pertanahan	79	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	Dinas Pertanahan
		80	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas Kabupaten/Kota.	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	Dinas Pertanahan